

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kondisi Kemiskinan di Indonesia masih merupakan problem sosial, sehingga menarik untuk dilakukan kajian dan perlu ditemukan solusinya. Hal ini disebabkan problem kemiskinan semakin bertambah seiring munculnya krisis multidimensional. Berbagai macam cara dilakukan, mulai dari kebijakan dan program yang diimplementasikan pemerintah untuk mengurangi problem kemiskinan ini, sehingga tidak sedikit dana yang sudah dikucurkan untuk menanggulangi problem kemiskinan. Problem kemiskinan ini cukup kompleks dan multidimensional, hal ini sangat berhubungan dengan segi sosial, ekonomi, budaya, dan aspek yang lainnya.

Masalah kemiskinan menjadi hal yang kompleks dan bersifat multidimensional, hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer artinya miskin aset, organisasi sosial politik, minimnya segi intelektual atau pengetahuan juga keterampilan sedangkan, aspek sekunder yaitu miskin dari segi koneksi sosial, basis atau informasi sumber keuangan juga informasi. Di sisi lain, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai masalah yang kompleks karena tidak hanya membahas terkait tingkat pendapatan dan konsumsi yang kurang. Selain itu, juga membahas terkait angka pendidikan dan kesehatan yang minim, serta tidak berdayanya untuk

turut andil dalam pembangunan serta berbagai masalah tentang pembangunan manusia juga termasuk. (Arsyad, 2010: 299).

Berdasarkan data yang dipublikasikan BPS, untuk bulan Juli tahun 2020, jumlah penduduk kategori miskin pada bulan Maret tahun 2020 secara prosentase sebesar 9,78 persen yang mencapai 26,42 juta, kemudian jumlah penduduk kategori miskin pada bulan Maret tahun 2020 pada daerah perkotaan meningkat menjadi satu juta tiga ratus ribu jiwa. Berdasarkan indeks Garis kemiskinan, di bulan Maret tahun 2020 mencapai 454.652 rupiah perkapita/bulan. Angka Rata - rata keluarga kategori miskin yaitu 4,66 keluarga. Maknanya bahwa garis kemiskinan di setiap keluarga kategori miskin sebesar 2.118.678 rupiah/rumah tangga perbulan (BPS, 2020).

Sesuai dengan Bab II Pasal 3 UU RI Nomor 13/ 2011 disebutkan Fakir Miskin memiliki hak untuk mendapatkan kecukupan makan, pakaian, tempat tinggal, mendapatkan layanan bidang kesehatan, layanan sekolah semua jenjang, dilindungi dan mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan pemulihan sosial untuk mampu mengembangkan dan berdaya bagi dirinya dan bagi keluarga, memiliki hak untuk hidup layak, memiliki lingkungan sehat, mendapatkan kesejahteraan yang terus menerus dan memiliki hak mendapatkan pekerjaan dan kesempatan untuk berusaha.

UU no 11/ 2009 merupakan pedoman kebijakan dalam meenyelenggarakan kesejahteraan dengan bersama sama dan terus menerus yang menjadi kewajiban pemerintah tingkat pusat sampai daerah maupun masyarakat, berupa pelayanan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar

bagi semua warga negara diantaranya adalah program rehabilitasi social yang merupakan suatu proses refungsionalisasi serta pengembangan agar setiap masyarakat fungsi sosialnya berfungsi sebagaimana mestinya dengan wajar dalam kehidupan sehari-hari. Program pemulihan sosial ini dilakukan dengan berbagai kebijakan antara lain kegiatan memberikan dorongan dan mengkaji masalah psikososial, aksesibilitas, bantuan dan pendampingan sosial. Indikator yang penting dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial adalah menyediakan akses dalam pelayanan perumahan serta pemukiman (Yovanda, 2019).

Salah satu program untuk menanggulangi problem kemiskinan adalah melalui memberikan pemberdayaan berkelanjutan yaitu rancangan mengenai asas serta usaha perbaikan Rumah yang tidak layak dihuni. Program ini tidak hanya berkaitan dengan kondisi bangunan rumah saja, namun juga lebih dititikberatkan pada kebijakan memberdayakan kapabilitas golongan masyarakat yang miskin agar memahami dan sadar akan pentingnya rumah yang layak untuk ditempati. Berdasarkan aspek sosial, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesetiakwaan sosial dan budaya gotong royong yang sudah mulai terkikis. Program sosial Rumah yang tidak Layak Huni diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak mampu untuk memiliki tempat tinggal layak untuk dihuni, serta sebagai motivasi bagi masyarakat tidak mampu agar dapat mengembangkan lebih baik kondisi sosialnya.

Pelaksanaan Pemulihan Sosial pada tempat tinggal yang tidak memiliki kelayakan untuk dihuni di Kota Batu ini merupakan salah satu kebijakan dalam

mempercepat penanggulangan kemiskinan, dimulai pada tahun 2017 sesuai dengan Permensos No: 20/2017, selanjutnya ditindaklanjuti melalui Surat Keputusan Walikota Batu No 67/ 2019 tentang Penetapan Penerima Bantuan Bedah Rumah yang Tidak Layak dihuni. Pada tahun 2020 mencapai 96 Rumah dalam RTLH yang ada di Kota Batu sebagai penerima program.

Fakta di lapangan, terdapat beberapa alasan terkait dengan permasalahan yang dihadapi Pemkot Batu antara lain : terdapat masyarakat yang masih belum tahu dengan kegiatan Rehabilitasi Sosial pada Rempat Tinggal yang tidak layak untuk dihuni ini, belum menyentuh semua warga miskin dan mempunyai tempat tinggal mendapatkan program. Selain itu pelaksanaannya juga mengalami permasalahan seperti petunjuk teknis yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya, proses renovasi/pembangunan rumah yang belum selesai, mengakibatkan keluarga yang menerima bantuan belum dapat menempati rumah yang sedang direnovasi dan program belum dirasalam manfaatnya dengan baik. Maka dari itu, peran pemerintah Khususnya Dinas Sosial sangat dibutuhkan dalam masalah ini.

## **B. Perumusan Masalah**

Berikut disajikan rumusan masalah sesuai dengan latar belakang yang ada:

1. Bagaimana peran Disos Kota Batu pada kebijakan mengentaskan kondisi Kemiskinan yang ditempuh melalui Pembangunan tempat tinggal yang tidak layak untuk dihuni?

2. Faktor apa yang menjadi penghambat peran Dinas Sosial Kota Batu untuk mengentaskan Kemiskinan dengan pelaksanaan Pembangunan pada rumah yang tidak layak untuk dihuni?

### **C. Tujuan dari Penelitian**

Merujuk pada rumusan penelitian, tujuan yang ingin dicapai penelitian ini untuk:

1. Mengetahui serta melakukan analisis aspek peran Dinas Sosial Kota Batu guna mengentaskan Kemiskinan dengan kegiatan Pembangunan tempat tinggal yang tidak layak untuk dihuni
2. Mengetahui serta melakukan analisis penyebab yang menghambat peran Dinas Sosial Kota Batu pada program mengentaskan Kemiskinan dengan kegiatan Pembangunan tempat tinggal yang tidak layak untuk dihuni

### **D. Kegunaan Penelitian**

Outcome riset diharapkan memberikan manfaat teoritis serta praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Temuan Penelitian diharapkan berguna sebagai Bahan referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Kemiskinan maupun kesejahteraan social.

2. Manfaat Praktis

Untuk Pemerintah terutama Dinas Sosial, temuan penelitian diharapkan mampu memberi kontribusi yang positif dalam rangka membuat kebijakan Kemiskinan khususnya Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni.

## **E. Definisi Konsep dan Definisi Operasional Penelitian**

### **1. Definisi Konsep**

#### **a. Peran Dinas Sosial**

Peran dimaknai sebagai perilaku yang diinginkan oleh orang lain yang sesuai dengan statusnya dalam sistem yang mana dapat disebabkan oleh kondisi sosial, secara intern dan eskternal yang memiliki sifat stabil guna membentuk sutu perilaku yang menjadi harapan pada kondisi sosial tertentu (Kozier Barbara :1995:21).

Peranan dimakani sebagai unsur yang dinamis sebagai status, Apanila individu telah memenuhi hak kewajibannya sesuai statusnya, secara langsung inividu tersebut sudah memiliki suatu peranan. Jadi, peranan akan menentukan apa saja yang harus dilkaukan oleh individu sesuai dengan posisinya dalam masyarakat (Soerjono Soekanto:1990:10).

Berdasarkan beberapa pengertian konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan sesuatu yang telah menjadi bagian pada suatu lembaga dimana lembaga tersebut dianggap sebagai komando yang utama dalam melakukan kegiatan baik didalam maupun diluar organisasi. Pada penelitian ini, Dinsos Kota

Batu merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, yang memiliki peran untuk melaksanakan urusan pemerintahan terutama berkaitan dengan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial dalam Pelaksanaan Program RTLH.

b. Kemiskinan

Kemiskinan terdiri dari dua konsep : miskin secara mutlak dan relatif. Yang dimaksud mutlak adalah segolongan warga masyarakat dengan angka kemiskinan lebih rendah dari Garis Kemiskinan Daerah (GKD). Maknanya golongan masyarakat ini tidak mampu memenuhi kebutuhan pakaian, kebutuhan makanan, kebutuhan untuk sekolah dan kebutuhan kesehatan. Kondisi miskin relatif ini didasarkan pendekatan secara ekonomi dan non ekonomi. Miskin secara relatif didasarkan pada kondisi tidak mampunya memenuhi kebutuhan hidup sesuai standar pada masyarakat dimana mereka tinggal.

Bentuk Kemiskinan terdiri : (1) Kemiskinan absolut, yang merupakan kondisi masyarakat dengan penghasilan yang tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan pokok makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jenis Masyarakat ini di bawah garis kemiskinan dan merupakan masyarakat miskin secara mutlak; (2) Kemiskinan secara relatif merupakan keadaan dimana seseorang belum memiliki kemampuan mencukupi kebutuhan yang pokok berdasarkan kebutuhan saat selain makanan, pakaian dan papan akan tetapi

termasuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan; (3) Kemiskinan secara kultural y yang disebabkan suatu masyarakat terisolasi, mereka membatasi diri untuk berinteraksi dengan dunia, kegiatan komunikasi yang kurang dengan masyarakat lain, yang mana akan menyebabkan kurangnya wawasan dan informasi. Umumnya terjadi pada daerah yang sedang berlangsung konflik; (4) Kemiskinan secara struktural yaitu kemiskina yang diakibatkan banyaknya hambatan yang dihadapi dan diluar kemampuan seseorang, sehingga menghambat seseorang untuk memiliki kesempatan. Hambatan umumnya berkaitan dengan birokrasi, peraturan perundang-undangan (Bagong Suyanto:2013:65).

Secara umum, suatu kemiskinan dimaknai sebagai kurangnya suatu penghasilan dan kekayaan yang digunakan mencukupi kebutuhan pokok untuk makanan, membeli pakaian, memiliki tempat tinggal, akses sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan mendapatkan pelayanan bidang kesehatan. dan memenuhi semua kebutuhan sosial, lingkungan, pemberdayaan, dan serta partisipasi. Umumnya Mereka memiliki pandangan dan indicator sendiri yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan. Golongan masyarakat miskin yang kurang berdaya dalam menghadapi kesulitan secara internal maupun eksternal, akan menambah rumit kondisi mereka. Kondisi Kemiskinan dan problem sosial yang berkelanjutan akan mengakibatkan kemiskinan secara cultural (Haryati, R., Sri, G. Setiti dan Aulia, R.:2011:25).

c. Rumah Tidak Layak Huni

Menurut Peraturan Menteri Sosial 20/2017 pada pasal 1, ayat ke 1 yang memberikan pengertian rumah yang tidak layak untuk dihuni yang selanjutnya diberi nama Rutilahu merupakan rumah tinggal yang secara kriteria tidak sesuai dengan syarat kesehatan, kondisi keamanan, dan secara sosial. Beberapa Kriteria dari RTLH itu antara lain permasalahan mendasar terkait kondisi rumah yaitu Atap rumah, Lantai rumah, Dinding rumah. Apabila pada suatu keluarga memiliki permasalahan pada ketiga hal tersebut maka keluarga tersebut patut untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial. Bantuan yang diberikan hanya bersifat stimulan, harus terdapat swadaya dari yang menerima bantuan, dari keluarga terdekat, maupun dari tetangga disekitarnya. Jika tidak ada swadaya, maka rumah yang dibangun kondisinya akan tetap sama dengan kondisi sebelum dibangun dan akan tetap dikategorikan sebagai tempat tinggal rumah yang tidak memiliki kelayakan untuk ditempati.

Program rehabilitasi pada Rumah yang yang tidak memiliki kelayakan untuk dihuni ini merupakan program yang dikhususkan bagi rumah tangga golongan miskin saja, dengan kriteria rumah yang tidak sesuai standar untuk hunian. Hal ini ditujukan agar golongan miskin ini dapat meningkatkan kondisi taraf hidup yang wajar dan memiliki rumah hunian sesuai standar. Program ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial dari penduduk

golongan miskin agar ikut berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan kegiatan secara swakelola.

## 2. Definsi Operasional

Operasional variabel penelitian merupakan penjabaran variabel dengan memperinci indikator - indikator dari variabel yang diteliti. Operasional variabel dimaksudkan agar data yang akan dikumpulkan oleh peneliti lebih terarah dan lebih mendalam. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

Rehabilitasi Sosial pada Rumah yang Tidak Layah untuk dihuni yang merupakan program bagi kesejahteraan sosial pada golongan miskin agar memiliki rumah yang layak untuk di huni. Peranan dari Dinas Sosial pada program pembangunan Rumah yang tidak layak dihun terdiri:

- a. Peran sebagai Stabilisator, dalam hal ini peran dari pemerintah dalam mewujudkan suatu perubahan agar muncul problem social dimasyarakat, dimana problem tersebut mengancam kedaulatan kesatuan serta persatuan Negara . Peran pmerintah ini akan mampu diwujudkan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pembangunan pada tempat tinggal rumah yang tidak memiliki kelayanakan untuk ditempati
- b. Peran sebagai Inovator, pemerintah diharapkan sebagai sumber penemuan baru dalam mengentaskan Kemiskinan Melalui Program Pembangunan pada tempat tinggal rumah yang tidak memiliki kelayanakan untuk ditempati.

- c. Peran sebagai Modernisator dimana dengan adanya kebijakan pembangunan untuk mengentaskan Kemiskinan dilakkan dengan Program Pembangunan pada tempat tinggal rumah yang tidak memiliki kelayanakan untuk ditempati.
- d. Peran sebagai fasilitator dimana pemerintah memberikan fasilitas untuk pelaksanaan pembangunan daerah dengan memberikan pendampingan
- e. Peran sebagai pelaksana sendiri pada kegiatan mengentaskan Kemiskinan dengan Program Pembangunan pada tempat tinggal rumah yang tidak memiliki kelayanakan untuk ditempati

## **F. Metode Penelitian**

Riset ini menggunakan desain kualitatif untuk mengetahui secara lebih jelas peran dari Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kota Batu pada kebijakan mengentaskan Kemiskinan Melalui Program Pembangunan pada tempat tinggal rumah yang tidak memiliki kelayanakan untuk ditempati. Penelitian jenis kualitatif itu sendiri bertujuan memahami suatu fenomena yang sedang dialami oleh subyek yang diteliti, dilakukan secara holistik, mendiskripsikan dengan kalimat, secara khusus dan alami apa adanya berdasarkan konsep alamiah (Lexy .J Moleong: 2009:35).

### **1. Jenis Riset**

Riset ini adalah menggambarkan peran Dinas Sosial Pemkot Batu dalam mengentaskan pada Program Pembangunan tempat tinggal rumah yang tidak memiliki kelayakan untuk ditempati i, dengan tujuan untuk memberikan suatu deskripsi yang sistematis, secara faktual dan akurat dari fenomena yang diteliti. Penggunaan metode deskriptif ini diharapkan memberikan deskripsi yang faktual peran Dinas Sosial Pemerintah Kota Batu dalam melaksanakan peranya, serta dapat diketahui semua faktor yang mendukung dan factor yang menghambat.

## **2. Sumber Data.**

### **a. Data Primer**

Data penelitian di peroleh menggunakan dua cara yaitu:

- (1) Hasil observasi visual, dilakukan untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Batu untuk mengentaskan Kemiskinan Melalui Program Pembangunan pada tempat tinggal rumah yang tidak memiliki kelayakan untuk ditempati
- (2) Data dari wawancara dilakukan terhadap informan pada Kantor Dinas Sosial Pemkot Batu untuk mendapatkan uraian dan hasil yang dilaksanakan Dinas Sosial Pemkot Batu dalam mengentaskan Kemiskinan dengan pelaksanaan Program Pembangunan pada tempat tinggal rumah yang tidak memiliki kelayakan untuk ditempati.

### **b. Data Sekunder**

Makna sekunder dalam hal ini adalah data tersebut dikumpulkan bukan oleh peneliti, tidak dari sumber aslinya, Jenis data ini berupa data sudah diolah instansi sebagai tempat penelitian. Data berupa dokumen, catatan resmi dari instansi, laporan serta berbagai arsip dari Situs Penelitian.

### **3. Metode Pengambilan Data**

Data dalam Riset ini diambil dengan cara yaitu

#### **a) Wawancara**

Kegiatan Wawancara dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung oleh peneliti dengan Informan yang menggunakan beberapa daftar pertanyaan untuk pedoman. Pada penelitian ini menggunakan jenis wawancara secara terstruktur dimana disusun secara rinci atau dengan mengacu pada draf pertanyaan. Tujuan dari metode wawancara ini agar peneliti tetap fokus pada lingkup penelitian, agar tidak meluas pada masalah selain yang diteliti (Gulo, W:2002: 118).

#### **b) Observasi**

Metode Observasi ini peneliti mencatat secara langsung semua informasi sesuai yang ada dilapangan, peneliti mengamati langsung, mendengarkan keterangan narasumber, selanjutnya peneliti mencatat secara subyektif, cara observasi ini dirancang dengan tertata, dicatat kapan waktunya dan dimana tempatnya.

#### **c) Dokumentasi**

Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan mencatat peristiwa yang berlaku berupa tulisan, visual maupun data lain yang diperoleh secara resmi dari instansi tempat penelitian sesuai dengan kebutuhan data yang dibutuhkan untuk penelitian

#### **4. Teknik Pemilihan Informan**

Nara sumber riset ini adalah berbagai pihak yang dirasa kredibel untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dilakukan secara purposive sampling. Berbagai Pihak ini antara lain

- a. Kepala Kantor dari Dinas Sosial Pemkot Batu
- b. Kepala Bidang bagian Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Pemkot Batu
- c. Kepala Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial dari Kantor Dinas Sosial Pemkot Batu

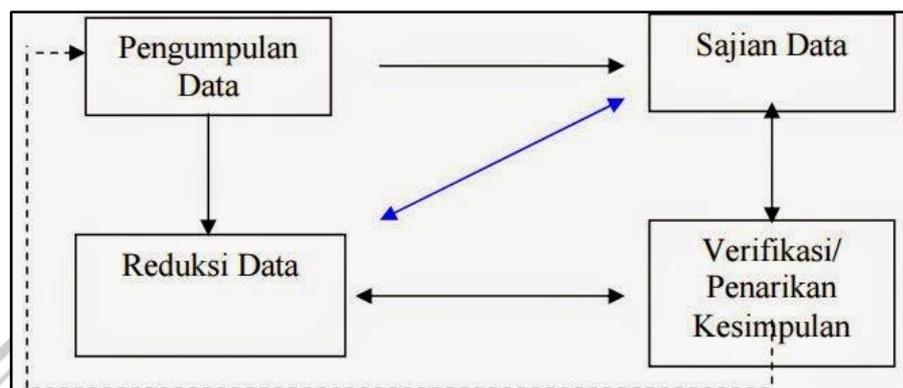
#### **5. Tempat Penelitian**

Situs yang dijadikan obyek penelitian ini adalah Dinas Sosial Pemerintah Kota Batu, yaitu Program Pembangunan pada Rumah yang Tidak Layak untuk dihuni, serta un tuk mengetahui semua faktor yang mendukung dan menghambat.

#### **6. Teknik Analisa Data**

Analisis dalam riset ini menggunakan analisis kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan data yang diteliti. Tahapan analisis yang dilakukan yaitu:

**Gambar 1.1** Model Interaktif dari Miles dan Huberman



Sumber : Miles & Huberman, (1992)

**a) Proses Mengumpulkan data**

Proses mengumpulkan data pada penelitian ini dengan mempergunakan metode wawancara dan dokumentasi (Bungin Burhan:2003:70). Kegiatan mengumpulkan data ini dilakukan p[ada waktu pra penelitian dan pada waktu sedang meneliti. Proses pengumpulan data melalui pengamatan kejadian dipangan langsung, melakukan interview dengan narasumber, kemudian melakukan dokumentasi dengan cara menulis.

**b) Proses Mereduksi Data**

Kegiatan mereduksi data dilakukan dengan metode penyederhanaan data, memberikan abstraksi merubah seluruh data hasil dari yang dicatat di tempat penelitian (Matthew B.M, dan. M. Huberman:1992:16). Proses mereduksi data dengan cara mengelompokkan

hasil penelitian dengan rumusan masalah yang ditetapkan yang hanya diuraikan singkat, data yang sekiranya kurang perlu tidak dipergunakan, dan kemudian mengelompokkan hasil penelitian untuk diverifikasi..

**c) Proses Display Data**

Proses yang dilakukan adalah menyajikan hasil penelitian atau berbagai informasi hasil penelitian untuk disimpulkan (Matthew B.M, dan. M. Huberman:1992:16). Penyajian data ini dilakukan agar data lebih terorganisir, tersusun secara agar mudah dimenegrti, dilakukan dengan uraian yang ringkas, menggunakan bagan, atau menggunakan flow chart.

**d) Menarik Kesimpulan**

Tahap terakhir adalah membuat kesimpulan dari data dari hasil dari penelitian. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan suatu pola, suatu penjelasan, alur sebab akibat. Proses memberikan kesimpulan ini tidak sekali jadi, harus dilakukan secara interaktif, menyajikan data untuk memberi kesimpulan selama proses meneliti. Setelah kegiatan verifikasi, baru dapat disimpulkan dalam format kalimat naratif.

